



POHON KINERJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN**

GAMBARAN UMUM

1. Informasi/Data tentang Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Kebumen adalah:

- a. Terwujudnya birokrasi yang kapabel, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks SPBE sebesar 3,42 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau Indeks SPBE sebesar 3,60;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 86;
- c. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 64,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai sebesar 77,00.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Kab.Kebumen adalah:

- a. Meningkatnya tata kelola SPBE, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks SPBE sebesar 3,42 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau Indeks SPBE sebesar 3,60;
- b. Meningkatnya pengelolaan *website* satu data, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data sesuai SOP sebesar 100% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan juga mencapai 100%.
- c. Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi, dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase desa/kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi desa/kelurahan sebesar 16,74% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan sebesar 100%.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kominfo Kab.Kebumen, adalah penerapan *e-government* yang belum optimal. Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya *good governance* yang ingin diwujudkan namun *smart governance*, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan *e-government* di Kabupaten Kebumen yang belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal.

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatnya tata kelola SPBE

Dengan meningkatnya kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

3.1.2. Meningkatnya pengelolaan *website* satu data

Dengan meningkatnya pengelolaan *website* satu data diharapkan akan meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

3.1.3. Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi

Dengan meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Ultimate Outcome	Outcome	CSF (Intermediete Outcome)
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Meningkatnya tata kelola SPBE	Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE
		Meningkatnya Indeks PPID
		Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan

		daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya indeks PPID	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Pohon Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:

POHON KINERJA

3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Terwujudnya birokrasi yang kapabel				Indeks SPBE
	Meningkatnya tata kelola SPBE			Indeks SPBE
		Meningkatnya nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE		Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE
		Meningkatnya indeks PPID		Indeks PPID
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik
		Meningkatnya cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		

			Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data			Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP

		Meningkatnya persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP		Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel				Nilai SAKIP
	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi			Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan
		Meningkatnya persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan		Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan